

KETERPADUAN UPAYA PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN

Oleh:

Ginandjar Kartasasmita
Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri

**Disampaikan pada Kursus Reguler Angkatan ke XXXI LEMHANNAS
Jakarta, 13 Agustus 1998**

I. Pendahuluan

Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan LEMHANNAS dan Jajarannya yang untuk kesekian kalinya memberi kesempatan kepada saya untuk bertatap muka dan berbicara di hadapan para peserta Kursus Reguler Angkatan XXXI. Kesempatan ini ingin saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk saling bertukar pandangan dan mengembangkan pola pikir mengenai topik yang akan dibahas pada hari ini yang menurut hemat saya sangat relevan dengan perkembangan ekonomi Indonesia dewasa ini.

Membicarakan masalah keterpaduan antara peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari tujuan akhir bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan akhir yang ingin diwujudkan negara Indonesia yang merdeka adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian berarti bangsa Indonesia setelah mencapai kemerdekaan, ingin menjadi bangsa yang maju dalam kehidupan yang berkeeseimbangan. Tujuan tersebut diwujudkan melalui proses pembangunan yang mencakup bidang ekonomi dan bidang-bidang kehidupan lainnya, demi terwujudnya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan meningkatnya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, sekaligus meningkatkan kemandirian sebagai bangsa.

Dengan memperhatikan hal-hal yang sangat mendasar tersebut, maka ceramah ini akan difokuskan pada pembahasan tentang : **pertama**, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan upaya mewujudkan kemajuan serta kemandirian bangsa; dan **kedua**, berbagai macam kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dewasa ini dalam upaya mengatasi krisis ekonomi yang sekaligus juga untuk menghadapi tantangan dalam era globalisasi dan tetap konsisten dengan upaya terus mewujudkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang makin maju, mandiri, dan sejahtera.

II. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Upaya Mewujudkan Kemajuan dan Kemandirian

Pertumbuhan ekonomi yang tercermin, antara lain, dari proses meningkatnya pendapatan per kapita, pada gilirannya menyebabkan naiknya tingkat tabungan nasional, penerimaan pemerintah terutama dari pajak, dan berubahnya pola pengeluaran konsumsi masyarakat. Sementara itu peningkatan pendapatan per kapita, penerimaan pemerintah, dan tingkat tabungan nasional memungkinkan berlangsungnya peningkatan kapasitas produksi baik berupa kapasitas produksi secara fisik, misalnya sarana dan prasarana produksi, maupun kapasitas produksi dalam bentuk makin tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Meningkatnya kapasitas produksi secara fisik tersebut terutama terjadi karena meningkatnya investasi baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah sebagai akibat dari naiknya tingkat tabungan masyarakat

dan pemerintah. Demikian pula dengan meningkatnya kapasitas produksi dalam sumber daya manusia, tercermin dari peningkatan tingkat keterampilan, pendidikan, kesehatan, dan penguasaan teknologi para pekerja, dimungkinkan karena makin banyaknya sarana dan prasarana pendidikan baik yang dapat disediakan oleh pemerintah maupun yang dibiayai oleh masyarakat.

Interaksi antara peningkatan kapasitas produksi, sebagai akibat terjadinya investasi dalam bentuk fisik dan sumber daya manusia, di satu pihak dan berubahnya pola konsumsi masyarakat seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita di lain pihak, pada gilirannya menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur produksi dan ketenagakerjaan. Tegasnya struktur produksi dan ketenagakerjaan bergeser ke arah makin besarnya kontribusi sektor non pertanian, terutama industri pengolahan dan jasa, sedangkan kontribusi sektor pertanian cenderung menurun. Pada giliran selanjutnya perubahan dalam struktur produksi tersebut juga tercermin pada struktur barang dan jasa yang diperdagangkan antar negara.

Peningkatan dalam pendapatan per kapita yang disertai dengan meningkatnya penerimaan pemerintah dan tingkat pendidikan penduduk pada gilirannya berdampak positif terhadap penurunan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tingkat kematian, peningkatan usia harapan hidup, dan menurunnya tingkat kelahiran. Sementara itu meningkatnya pendapatan per kapita yang disertai dengan makin tingginya tingkat pendidikan penduduk akan mendorong aspirasi masyarakat untuk makin berperanserta dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik maupun pertahanan keamanan. Untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat ini diperlukan adanya sistem dan kelembagaan politik yang makin maju dan demokratis. Tegasnya dalam masyarakat yang makin maju timbul keinginan untuk dapat dipenuhi jaminan hak-hak yang paling azasi, rasa aman, dan rasa ketenteraman dalam hidupnya.

Pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya menyebabkan perekonomian suatu negara menjadi tambah maju, biasanya disertai dengan terjadinya spesialisasi dalam kegiatan antar unit usaha dan dalam tiap unit usaha. Itulah sebabnya makin maju suatu negara biasanya disertai dengan berlangsungnya proses yang ditandai, antara lain, a) tiap unit usaha cenderung memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh pasar dan bukan yang dibutuhkan oleh unit usaha tersebut; b) pemilahan antara pemilik dan pengelola unit usaha; c) pemilahan antara pemilik dana dengan pengguna dana; dan d) implikasi dari a, b, c, menyebabkan, antara lain, (i) tiap anggota masyarakat dapat berperan sekaligus sebagai produsen dan konsumen, (ii) sebagai pemilik / pemegang saham dalam suatu unit usaha dan sekaligus menjadi pengelola di unit usaha yang lain, dan (iii) pemilik dana simpanan di berbagai lembaga keuangan dan sekaligus sebagai peminjam dana dalam posisinya sebagai wirausaha. Dalam situasi seperti itu adanya tatanan hukum yang menjamin hak dan kewajiban seseorang baik sebagai konsumen, produsen, pemilik dana, maupun sebagai peminjam dana sangatlah diperlukan.

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi karena meningkatnya kapasitas produksi, melainkan juga karena meningkatnya efisiensi dalam penggunaan kapasitas produksi. Peningkatan dalam efisiensi penggunaan kapasitas produksi, antara lain, dipengaruhi oleh berkembangnya penelitian yang diikuti dengan terjadinya berbagai hasil penemuan yang kemudian dikembangkan dalam bentuk inovasi pada berbagai kegiatan produksi, pemasaran, distribusi, dan pembiayaan. Dalam kaitannya dengan berkembangnya inovasi di bidang produksi hal yang sangat menentukan adalah adanya jaminan perlindungan terhadap hak seseorang yang menghasilkan inovasi tersebut. Selain itu perlu ditegaskan di sini bahwa peningkatan dalam kapasitas produksi sumber daya manusia ikut memperlancar bagi berkembangnya berbagai inovasi dalam kegiatan produksi, pemasaran, distribusi, dan pembiayaan.

Jelas kiranya dari uraian di atas, terlihat adanya interaksi antara pertumbuhan ekonomi dan kemajuan serta kemandirian suatu bangsa. Sebagaimana diketahui karakteristik yang menonjol dari suatu bangsa yang makin maju, tercermin, antara lain, pada kelompok indikator sebagai berikut : **pertama**, dalam indikator ekonomi, tercakup, antara lain, (i) makin tinggi tingkat pendapatan per kapita dan makin merata pendistribusiannya; (ii) industri manufakturnya makin kokoh, dan kontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) relatif besar; (iii) lembaga dan

pranata ekonomi telah tersusun dan tertata serta berfungsi dengan baik sehingga dapat mendukung berlangsungnya perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi; dan (iv) perekonomiannya stabil dalam arti berbagai macam gejolak dapat diredam oleh ketahanan ekonominya, tingkat inflasi relatif rendah, perubahan nilai tukar relatif kecil, serta defisit dalam transaksi berjalan juga relatif rendah; **kedua**, menurut indikator sosial, terlihat, antara lain, (i) tingkat pendidikan penduduk dan angkatan kerja makin tinggi; (ii) laju pertumbuhan penduduk relatif rendah; dan (iii) tingkat kesehatan penduduk makin tinggi, antara lain, ditandai oleh makin tingginya harapan hidup pada waktu lahir; dan **ketiga**, dalam indikator politik, yang menonjol, antara lain, adalah (i) memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap; (ii) peranserta rakyat yang nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan keamanan; (iii) menganut demokrasi yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya; dan (iv) warganya terjamin hak-haknya, rasa keamanan, dan ketenteraman dalam kehidupannya.

Sementara itu, karakteristik bangsa yang mandiri adalah mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Hal ini, antara lain, tercermin pada : **pertama**, makin tinggi ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; **kedua**, makin kecil ketergantungan kepada sumber pembiayaan dari luar negeri, dalam arti sebagian besar dari investasi negara tersebut dibiayai dari tabungan nasionalnya; **ketiga**, memiliki kemampuan untuk memenuhi sendiri berbagai macam kebutuhannya dan apabila karena kondisi objektif tidak memungkinkan, ketergantungan terhadap luar negeri untuk berbagai kebutuhan dapat diimbangi dengan kemampuan memasok barang dan jasa lainnya ke luar negeri, sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan; dan **keempat**, memiliki kepercayaan terhadap kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian atau jati diri bangsa.

Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menyebabkan terwujudnya bangsa yang maju dan mandiri sebagaimana juga yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetap menjadi sasaran penting dalam hubungannya untuk memungkinkan berlangsungnya berbagai kegiatan pembangunan pada bidang lain secara merata dan seimbang serta terlaksana dalam keadaan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Dihubungkan dengan indikator ekonomi, stabilitas yang mantap dan dinamis seperti yang tercermin, antara lain, dari relatif rendahnya laju inflasi dan perubahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing akan berimplikasi tidak hanya berdampak positif terhadap peningkatan tabungan nasional dan investasi ke arah yang produktif, melainkan juga berdampak positif dalam upaya mengentaskan penduduk dari kemiskinan dan melindungi kelompok penduduk yang berpendapatan relatif tetap.

Untuk menjelaskan latar belakang berbagai macam kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dewasa ini, saya akan mulai dengan mengemukakan bukti empiris tentang perkembangan ekonomi Indonesia sejak awal Pelita I sampai dengan pertengahan tahun 1997 atau sebelum krisis ekonomi mulai melanda Indonesia. Dalam periode 1969 - 1997 perekonomian Indonesia senantiasa tumbuh tanpa pernah mengalami penurunan dengan laju pertumbuhan termasuk kelompok tertinggi di antara negara sedang berkembang. Tegasnya pertumbuhan PDB atas dasar harga konstan selama periode 1969 - 1997 lebih kurang 7 persen per tahun atau pendapatan per kapita secara riil tumbuh lebih dari 5 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut telah berhasil mengentaskan berjuta-juta penduduk miskin dari garis kemiskinan serta menampung angkatan kerja untuk bekerja di kegiatan formal. Selain itu pertumbuhan ekonomi tersebut juga disertai dengan meningkatnya kapasitas produksi baik secara fisik, meningkatnya sarana dan prasarana produksi, maupun dalam bentuk sumber daya manusia. Peningkatan dalam sumber daya manusia tercermin dari meningkatnya tingkat partisipasi untuk berbagai jenjang pendidikan, meningkatnya tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi dari para pekerja, dan meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk. Peningkatan dalam tingkat kesejahteraan penduduk tercermin, antara lain, dari peningkatan usia harapan hidup atau

menurunnya tingkat mortalitas. Penurunan dalam tingkat mortalitas di Indonesia juga disertai dengan menurunnya tingkat kelahiran, baik karena dilaksanakannya program keluarga berencana maupun disebabkan makin tingginya tingkat pendidikan penduduk, terutama penduduk perempuan. Perlu ditegaskan di sini bahwa sejak tahun 1980-an penurunan tingkat kelahiran cenderung lebih cepat dari penurunan tingkat mortalitasnya, sehingga laju pertumbuhan penduduk cenderung menurun.

Keadaan ekonomi Indonesia tampaknya juga semakin baik sejak dilaksanakannya berbagai program deregulasi dalam perekonomian Indonesia pada tahun 1985. Dalam kurun waktu 1985 - 1997 perekonomian Indonesia, atas dasar harga konstan, tumbuh dengan rata-rata lebih dari 7,5 persen per tahun atau pendapatan nasional per kapita secara riil tumbuh dengan rata-rata sekitar 5,8 persen per tahun, sedangkan laju inflasinya kurang dari 9 persen. Bersamaan dengan itu selain dari berjuta-juta penduduk berhasil dihindarkan dari kemiskinan dan angkatan kerja dapat ditampung di kegiatan formal serta peningkatan kapasitas produksi baik secara fisik maupun sumber daya manusia terus berlangsung, juga kita menyaksikan pula kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah relatif rendah; defisit dalam transaksi berjalan mampu diimbangi dengan terjadinya surplus dalam transaksi modal sehingga cadangan devisa cenderung terus meningkat; tabungan pemerintah dan swasta terus meningkat; dan bahkan selama periode 1993/94 - 1996/97 anggaran belanja negara mengalami surplus.

Berbagai keberhasilan yang dialami Indonesia sampai dengan pertengahan tahun 1997, tampaknya telah menutupi berbagai macam kelemahan yang sedang berlangsung dalam perekonomian Indonesia. Kelemahan-kelemahan tersebut, antara lain, mencakup sektor dunia usaha dan lembaga keuangan, termasuk di dalamnya adanya kelemahan dalam pengawasan sistem keuangan, peningkatan upah dan gaji tanpa disertai kenaikan produktivitas, dan berkembangnya praktek monopoli dan oligopoli dalam perekonomian Indonesia. Keseluruhan kelemahan tersebut pada gilirannya menurunkan daya saing barang ekspor kita dan menjadikan perekonomian Indonesia kurang mampu bereaksi terhadap berbagai perubahan yang terjadi di pasar internasional.

Berbagai kelemahan tersebut di atas, sejak Juli 1997 kemudian dipicu oleh depresiasi rupiah yang tinggi serta keadaan politik yang tidak menentu, pada gilirannya telah menimbulkan ketidakpercayaan yang dalam terhadap perekonomian Indonesia. Keadaan ini diperburuk oleh berlangsungnya kemarau panjang yang berdampak negatif pada sektor pertanian, terutama dalam produksi bahan makanan. Tambahan pula keadaan tersebut makin diperburuk lagi dengan terjadinya penurunan harga migas di pasaran dunia yang cukup tajam, yang pada gilirannya telah berdampak negatif pada penerimaan negara dan devisa dari ekspor migas. Situasi tersebut telah mengakibatkan aliran modal berbalik dari situasi masuk menjadi ke luar, kontraksi dalam PDB terutama disebabkan menurunnya permintaan domestik, yang pada gilirannya telah meningkatkan jumlah pengangguran terbuka dan setengah menganggur, menurunkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat dari kelompok penduduk yang berpendapatan tetap dan sumber utama dari pendapatannya berasal dari upah dan gaji. Di pihak lain, depresiasi rupiah yang tinggi tersebut juga telah memacu inflasi. Interaksi antara penurunan pendapatan bagi kelompok penduduk berpendapatan tetap serta yang sumber utama dari pendapatannya berasal dari upah dan gaji atau kelompok penduduk berpendapatan rendah dan laju inflasi yang tinggi telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang sangat besar.

Dari uraian tersebut di atas, jelas terlihat bahwa tugas mendesak bagi pemerintah : **Pertama**, dalam jangka pendek mengurangi dampak negatif dari krisis tersebut terhadap kelompok penduduk berpendapatan rendah dan rentan; dan **kedua**, pemulihan pembangunan ekonomi ke jalur pertumbuhan yang tinggi. Kedua tugas tersebut sangat penting karena : **1)** makin meluasnya pengangguran dapat memicu kerusuhan sosial serta kalau berlangsung berkepanjangan angkatan kerja kita akan kehilangan daya saing karena tidak mampu menguasai perkembangan keterampilan baru yang sangat diperlukan; **2)** kapasitas produksi industri pengolahan yang menganggur dan semakin meningkat tanpa pemeliharaan yang baik akan

menjadi rusak; dan 3) kemunduran pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan bagi putra-putri penduduk berpendapatan rendah akan mengganggu upaya pemberdayaan kelompok penduduk berpendapatan rendah di masa datang.

III. Kebijakan untuk Menanggulangi Krisis

Untuk mengurangi dampak negatif dari krisis ekonomi terhadap kelompok penduduk berpendapatan rendah perlu dikembangkan jaring pengaman sosial yang meliputi program penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, mempertahankan tingkat pelayanan pendidikan dan kesehatan pada tingkat sebelum krisis dan penanganan pengangguran dalam upaya mempertahankan daya beli kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dalam kaitan ini berbagai langkah penyesuaian telah dilakukan untuk menambah alokasi anggaran rutin (untuk subsidi), mempertajam prioritas alokasi dan meningkatkan efisiensi anggaran pembangunan. Hal ini dilakukan melalui peninjauan kembali terhadap program dan kegiatan proyek pembangunan, antara lain, dengan : 1) menunda proyek-proyek dan kegiatan pembangunan yang belum mendesak; 2) melakukan realokasi dan menyediakan tambahan anggaran untuk memperkuat jaring pengaman sosial di bidang pendidikan dan kesehatan; 3) memperluas penciptaan kerja dan kesempatan kerja bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, yang dikaitkan dengan peningkatan produksi bahan makanan serta perbaikan dan pemeliharaan prasarana ekonomi, misalnya jalan dan irigasi, yang dapat memperlancar kegiatan ekonomi; dan 4) memperbaiki sistem distribusi agar berfungsi secara penuh dan efisien yang sekaligus meningkatkan partisipasi peranan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Sebagai akibat dari peninjauan kembali seluruh program dan kegiatan proyek pembangunan, total anggaran dalam revisi APBN untuk sektor pertanian, pengairan, perdagangan dan pengembangan usaha, pembangunan daerah, pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, dalam tahun anggaran 1998/99 tidak hanya mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan dengan APBN-nya, tapi secara riil juga lebih besar dari realisasi anggaran pembangunan tahun 1997/98, sedangkan alokasi anggaran pembangunan untuk sektor lainnya secara riil mengalami penurunan.

Implikasi dari pelaksanaan program jaring pengaman sosial yang disertai langkah penyesuaian untuk mempertajam prioritas alokasi dan peningkatan efisiensi anggaran pembangunan, pemerintah tidak dapat menghindari terjadinya defisit yang sangat besar, lebih kurang 8,5 persen terhadap PDB, dalam revisi APBN 1998/99. Hal ini disebabkan oleh karena penerimaan dalam negeri dalam situasi kontraksi PDB serta menurunnya harga migas di pasar internasional sangat sulit untuk dapat ditingkatkan, walaupun sudah termasuk adanya divestasi dalam BUMN.

Pemerintah sangat menyadari bahwa defisit APBN sebesar 8,5 persen terhadap PDB tidak *sustainable*, itulah sebabnya akan diupayakan untuk menurunkannya minimal menjadi setengahnya pada tahun 1999/2000 dan mengembalikan anggaran menjadi berimbang dalam jangka waktu 3 tahun. Sehubungan dengan ini akan terus dikaji langkah-langkah untuk menetapkan pemberian subsidi yang lebih tepat dan pelaksanaan program lain dalam kerangka jaring pengaman sosial. Pemantauan dan evaluasi program penciptaan lapangan kerja serta program di bidang pendidikan dan kesehatan akan terus disempurnakan agar dapat dipastikan bahwa yang memperoleh manfaat terutama adalah penduduk miskin. Di samping itu peningkatan kinerja penerimaan negara dan manajemen pengeluaran negara akan merupakan unsur terpenting dalam upaya menekan defisit anggaran. Dalam kaitannya dengan upaya memperkuat manajemen pengeluaran, akan disusun kerangka prioritas dalam pengeluaran negara yang lebih jelas, persiapan penyusunan anggaran yang lebih efisien, kontrol manajemen kas, serta penyusunan laporan yang komprehensif, akurat dan tepat waktu.

Pemulihan perekonomian Indonesia sangat tergantung atas keberhasilan upaya menyehatkan kembali sistem perbankan. Langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, membangun kembali sistem perbankan yang sehat, dan

memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, antara lain, meliputi : **1)** pemberian jaminan pembayaran kepada deposan dan kreditur; **2)** pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas untuk melakukan restrukturisasi bank-bank yang kurang atau tidak sehat; **3)** melakukan *due diligence* terhadap 6 bank yang diambil alih pengelolaannya dan terhadap bank-bank lainnya; dan **4)** menyusun RUU perbankan yang akan mengatur kembali ketentuan mengenai rahasia bank, pengawasan, pemilikan investor asing, dan kedudukan BPPN serta bank sentral.

Pemulihan perekonomian juga sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam upaya menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Upaya tersebut dilaksanakan dengan : **1)** kebijaksanaan moneter yang ketat disertai anggaran berimbang dengan membatasi defisit anggaran sampai pada tingkat yang dapat diimbangi dengan tambahan dana dari luar negeri; **2)** restrukturisasi hutang luar negeri; dan **3)** mengusahakan tambahan dana dari luar negeri.

Kebijaksanaan moneter yang ketat dimaksudkan untuk mendorong nilai tukar ketingkat yang lebih wajar dan menurunkan inflasi. Sasaran program moneter dirubah menjadi Aktiva Domestik Neto (**Net Domestic Asset** atau NDA) Bank Indonesia, dan bukan lagi uang primer seperti sebelumnya. Adapun maksud dari perubahan ini adalah untuk menahan ekspansi kredit Bank Indonesia yang telah meningkat dengan pesat dalam beberapa bulan terakhir ini. Ini berarti bahwa bantuan likuiditas kepada perbankan harus benar-benar dapat dikendalikan. Pembatasan terhadap NDA dan cadangan devisa neto (NIR) Bank Indonesia akan dijadikan kriteria kinerja. Sebagai implikasinya pertumbuhan jumlah likuiditas perekonomian (M2) akan relatif rendah serta ratio saldo uang kartal terhadap dana simpanan akan menurun.

Mengingat bahwa salah satu faktor terpenting yang telah mempengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah adalah dikarenakan relatif besarnya pinjaman luar negeri swasta dan pinjaman interbank oleh bank-bank di Indonesia yang dalam tahun 1998/99 akan jatuh waktu dengan jumlah cukup besar, maka untuk mengurangi permintaan terhadap mata uang asing di satu pihak serta memberi kesempatan pada para debitur untuk menyelesaikan hutang-hutangnya di lain pihak, perlu diciptakan mekanisme dalam restrukturisasi hutang luar negeri swasta dan perbankan nasional. Untuk itu telah ditandatangani **Frankfurt Debt Agreement** pada tanggal 4 Juni 1998, yang pada pokoknya memuat suatu kerangka untuk restrukturisasi hutang dunia usaha, skema penyelesaian hutang antar bank, dan pengaturan tentang fasilitas pembiayaan perdagangan. Partisipasi dalam restrukturisasi hutang dunia usaha bersifat sukarela serta para kreditur dan debitur dapat menyepakati pengurangan jumlah hutang dan perubahan pinjaman menjadi *equity*, namun jika mereka bersepakat mengenai penjadwalan pinjaman harus memenuhi persyaratan minimal masa pengembalian 8 tahun termasuk *grace period* 3 tahun. Di lihat dari upaya penguatan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, restrukturisasi hutang luar negeri dunia usaha dan perbankan tersebut berarti minimal mengurangi permintaan terhadap valuta asing selama 3 tahun. Tambahan pula untuk mendorong terjadinya perundingan antara para debitur dengan kreditur dikembangkan suatu sistem dan prosedur tentang kepailitan yang efektif.

Interaksi antara penambahan dana dari luar negeri baik melalui bantuan program CGI maupun tambahan dana dari IMF di satu pihak dan pengurangan permintaan terhadap valuta asing, melalui kebijaksanaan moneter yang ketat dan penjadwalan hutang luar negeri, di lain pihak, dapat diharapkan rupiah akan menguat, dan pada gilirannya juga akan menurunkan laju inflasi. Di samping itu adanya tambahan dana dari IMF, lembaga multilateral lainnya, dan negara-negara sahabat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para investor dan kreditur luar negeri terhadap Indonesia.

Dalam situasi permintaan dalam negeri yang menurun, maka wahana untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia adalah melalui promosi ekspor. Tambahan pula dengan nilai tukar rupiah yang terdepresiasi tinggi dewasa ini, Indonesia makin memiliki daya saing dalam barang ekspor yang padat karya dan padat kekayaan alam. Namun peningkatan ekspor dewasa ini dihadapkan kepada beberapa kendala, yakni keengganan pihak luar negeri membeli barang

Indonesia, ketiadaan bahan baku, serta hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ekspor, seperti misalnya operasi pelabuhan, kecepatan kerja, bea dan cukai, dan administrasi perpajakan.

Keengganan pembeli luar negeri untuk merencanakan pembelian terhadap produk industri manufaktur Indonesia, antara lain, disebabkan oleh kekhawatiran mereka atas ketidakmampuan para pengusaha Indonesia untuk dapat memenuhi pesanan tersebut tepat waktu. Hal ini erat kaitannya dengan permasalahan sosial politik yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Dengan demikian dalam upaya untuk mendorong ekspor, upaya terwujudnya stabilitas sosial politik sangatlah penting.

Kesepakatan Frankfurt akan berdampak positif bagi penyediaan bahan baku impor yang dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan produksi yang berorientasi ekspor. Selain itu mulai bulan Juli 1998 Bank Indonesia mengadakan program jaminan pre-shipment kepada eksportir yang sudah memperoleh L/C dari luar negeri untuk memperlancar impor bahan baku yang diperlukan dan untuk pembiayaan ekspor pre-shipment. Sementara itu untuk memperoleh modal kerja kebijaksanaan yang ditetapkan ada kaitannya dengan restrukturisasi dunia perbankan, dunia usaha, dan restrukturisasi pinjaman dunia usaha terhadap perbankan dalam negeri.

Di samping semua itu, pemerintah akan terus melanjutkan program reformasi struktural, agar perekonomian, terutama sektor riil, dapat berkembang lebih efisien. Iklim persaingan yang sehat akan ditegakkan sehingga kehidupan dunia usaha dapat menjadi tumpuan masyarakat untuk berpartisipasi meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Iklim persaingan yang sehat dimaksudkan agar para pelaku ekonomi tidak saling mematikan, tapi justru saling mendukung, bersinergi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesempatan berusaha.

IV. Penutup

Demikian pokok-pokok materi ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah wawasan kita bersama mengenai : **1)** kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan ; dan **2)** menghayati latar belakang berbagai macam kebijaksanaan yang diambil untuk mengatasi krisis ekonomi dewasa ini yang sekaligus juga untuk menghadapi tantangan dalam era globalisasi dan tetap konsisten dengan upaya mewujudkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang makin maju, mandiri, dan sejahtera.

Sebelum mengakhiri ceramah ini, sesuai dengan permintaan penyelenggara, saya masih bersedia menyediakan kesempatan untuk mengadakan tanya jawab sesuai dengan waktu yang disediakan.

Akhirnya atas perhatian Saudara Gubernur Lemhannas dan para peserta Kursus yang dengan serius serta aktif mengikuti ceramah ini, saya ucapkan terima kasih.